

# PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR ANTARA INDONESIA DAN CINA

**Nofita Ningsih, Aminullah**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

<sup>2</sup>Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: nofitaningsih7272@gmail.com , aminullah@yudharta.ac.id

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

## Abstract :

*This study compares public administration systems in managing exports and imports between Indonesia and China as a key factor supporting international trade. Using a qualitative, descriptive-comparative approach through literature review, the study analyzes institutional structures, administrative procedures, and government roles in both countries. The results indicate that Indonesia implements an administrative system involving multiple institutions, integrated through digitalization, such as the Indonesia National Single Window (INSW), while China uses a more centralized system with strong authority in one central institution. These differences impact efficiency, policy consistency, and ease of service for businesses. The study concludes that institutional structure and inter-institutional coordination significantly determine the effectiveness of export-import administration. These findings can serve as a reference for Indonesia in improving its international trade competitiveness.*

**Keywords:** Public Administration, Exports, Imports, Indonesia, China

## Abstrak :

Penelitian ini membahas perbandingan sistem administrasi publik dalam pengelolaan ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina sebagai faktor penting pendukung perdagangan internasional. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis struktur kelembagaan, prosedur administrasi, serta peran pemerintah di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem administrasi yang melibatkan banyak lembaga dengan upaya integrasi melalui digitalisasi seperti Indonesia National Single Window (INSW), sedangkan Cina menggunakan sistem yang lebih terpusat dengan kewenangan kuat pada satu lembaga utama. Perbedaan ini berdampak pada efisiensi, konsistensi kebijakan, dan kemudahan layanan bagi pelaku usaha. Penelitian menyimpulkan bahwa struktur kelembagaan dan koordinasi antarlembaga sangat menentukan efektivitas administrasi ekspor-impor, sehingga temuan ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing perdagangan internasional.

**Kata Kunci :** Administrasi Publik, Ekspor, Impor, Indonesia, Cina

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara karena mencerminkan kemampuan suatu bangsa menghubungkan produksi domestik dengan permintaan global .dalam konteks ekspor dan impor ,adminitrasi publik memainkan peran sentral dalam menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur perdangan tersebut .efisiensi adminitrasi ekspor-impor bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional ,tetapi juga pada daya saing suatu negara di pasar global. Di Indonesia,



berbagai Upaya reformasi administrasi telah dilakukan melalui digitalisasi system perizinan dan integrasi data melalui platform Indonesia national single window (INSW) untuk mempercepat proses ekspor-impor dan mengurangi hambatan birokrasi. Namun tantangan dalam implementasi masih terlihat pada koordinasi antar Lembaga dan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah negara (Wardani Umi & Yoga Kundhani, 2023).

Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar pada china sebagai mitra dagang utama, di mana komoditas ekspor seperti Batubara dan CPO secara signifikan memasok kebutuhan china meskipun ada dinamika kebijakan global yang mempengaruhi pola perdagangan ini. Peran administrasi publik terutama dalam mengatur tarif, prosedur kepabeanan, dan kebijakan perdagangan menjadi ujung tombak dalam memastikan kelancaran arus barang di pasar internasional. Pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk Trade Facilitation Agreement (TFA), yang bertujuan untuk menurunkan hambatan administratif dalam perdagangan dan mengefisienkan proses ekspor-impor, namun efektivitasnya beragam antar sektor (Setiawan & Febriani, 2023).

Sementara itu, china sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia menunjukkan dinamika yang berbeda dalam administrasi pengelolaan ekspor-impor. Nilai total perdagangan barang luar negeri china terus mengalami pertumbuhan meskipun terdapat penurunan impor dalam beberapa periode, sementara ekspor tetap kuat, menunjukkan efektivitas system pengolahan dan kebijakan bea cukai negara tersebut dalam menghadapi tantangan global. Struktur administrasi di china cenderung lebih terpusat, dimana koordinasi antar Lembaga menjadi lebih terintegrasikan, meskipun penelitian empiris mengenai mekanisme internal administrasi publik china dalam konteks perdagangan masih relative kurang terdokumentasi dalam sumber yang tersedia.

Berbeda dengan Indonesia, struktur administrasi public di china dipengaruhi oleh sistem politik yang terpusat dengan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat, sehingga Keputusan kebijakan sering kali dapat diimplementasikan secara cepat dan terkoordinasi. Hal ini tercermin dalam Upaya china untuk terus mengembangkan infrastruktur perdagangan seperti zona perdagangan bebas dan mekanisme kepabeanan yang adaptif. Namun meskipun administrasi publik china dianggap efisien, masih terdapat kekurangan dalam kajian komparatif yang membahas sejauh mana pendekatan ini berdampak langsung terhadap proses administrasi ekspor-impor dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia

Fenomena global seperti perang dagang dan proteksionisme juga memberikan tekanan tambahan terhadap sistem administrasi ekspor-impor Indonesia. Ketergantungan pada pasar china membuat Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global, sehingga administrasi public dituntut untuk lebih responsif dalam menyesuaikan tarif, perizinan, dan prosedur kepabeanan agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi

domestik. meski begitu, penelitian yang secara khusus membandingkan respons administrasi Indonesia dan china terhadap tantangan global ini masih terbatas.

Tinjauan atas literatur yang ada menunjukkan bahwa sejumlah studi telah membahas aspek-aspek tertentu dari administrasi publik dan perdagangan internasional di kedua negara, tetapi banyak yang masih berfokus pada satu negara tanpa membandingkannya secara langsung perbandingan sistem administrasi publik yang komprehensif terkait pengolahan ekspor-impor antara Indonesia dan china, termasuk proses pembuatan kebijakan, koordinasi antar Lembaga dan dampak procedural terhadap pelaku usaha, belum banyak dieksplorasi secara paralel. Hal ini menciptakan yang signifikan untuk studi komparatif sejenis guna mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan lintas konteks negara.

Dengan demikian penelitian ini sangat relevan dilakukan karena tidak hanya akan mengisi kekosongan literatur mengenai perbandingan administrasi publik dalam pengelolaan ekspor-impor antara dua negara berpengaruh besar di asia, tetapi juga membantu memahami strategi apa yang dapat diapopsi atau dikembangkan oleh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam perdagangan internasional. Hasil nya diharapkan dapat memberikan wawasan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pembuat Keputusan di kedua negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem administrasi publik dijalankan dalam pengelolaan ekspor dan impor di dua negara yang memiliki karakteristik pemerintahan dan sistem birokrasi yang berbeda, yaitu Indonesia dan Cina. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kebijakan, prosedur, serta mekanisme administrasi secara kontekstual, bukan sekadar mengukur variabel secara numerik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-komparatif, yang berfokus pada penggambaran dan perbandingan sistem administrasi publik dalam pengelolaan ekspor dan impor di Indonesia dan Cina. Desain ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek kelembagaan, prosedur administrasi, koordinasi antar lembaga, serta peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional. Dengan desain komparatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran sistematis mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem administrasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan perdagangan,

serta publikasi lembaga terkait ekspor dan impor di Indonesia dan Cina. Pemanfaatan data sekunder dianggap relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan sistem administrasi yang telah terdokumentasi secara resmi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran sistem administrasi public dalam pengelolaan ekspor dan impor Sistem Administrasi Publik Ekspor dan Impor di Indonesia

Sistem administrasi publik dalam pengelolaan ekspor dan impor di Indonesia melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga lembaga teknis lain yang berperan dalam perizinan dan pengawasan barang. Salah satu terobosan penting adalah penerapan Indonesia National Single Window (INSW), sebuah sistem layanan terpadu berbasis digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan ekspor dan impor secara elektronik. Sistem ini memungkinkan data dan dokumen ekspor-impor diinput sekali dan diteruskan ke seluruh lembaga terkait, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Meskipun INSW sudah memperlihatkan manfaat dalam menyederhanakan prosedur dokumen dan meningkatkan kecepatan pelayanan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil dan kebutuhan infrastruktur teknologi yang terus dikembangkan. Penguatan integrasi antar lembaga publik serta peningkatan kompetensi SDM masih menjadi fokus administrasi publik Indonesia dalam rangka menyempurnakan layanan ekspor-impor (Setiawan & Febriani, 2023).

### **Sistem administrasi public ekspor dan impor di china**

Di Cina, pengelolaan administrasi ekspor dan impor dipusatkan pada General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), lembaga di bawah Dewan Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepabeanan, pungutan bea, dan prosedur keluar-masuk barang. GACC menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan secara luas, termasuk inspeksi keamanan dan sanitasi untuk barang yang diimpor atau diekspor.

Selain itu, Cina terus mengembangkan kebijakan administratifnya untuk menyeimbangkan volume ekspor dan impor sejalan dengan strategi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam konteks upaya pencapaian keseimbangan neraca perdagangan di era Rencana Lima Tahun. Pada 2024, total nilai impor dan ekspor mencapai rekor baru, menunjukkan skala besar kegiatan perdagangan luar negeri dan kompleksitas administratif yang perlu dikelola oleh GACC (Wardani Umi & Yoga Kundhani, 2023).

Perbandingan struktur dan mekanisme administrasi publik Perbandingan Struktur Kelembagaan

Struktur administrasi publik untuk perdagangan di Indonesia bersifat multi-lembaga, di mana koordinasi antar instansi merupakan kunci utama dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor. Hal ini terlihat pada koordinasi pengelolaan dokumen melalui sistem INSW dan sinkronisasi data kepabeanan serta perizinan. Perlu upaya terus-menerus untuk mengurangi duplikasi tugas antar lembaga sehingga proses administrasi lebih efektif dan responsif.

Sebaliknya, di Cina, struktur administrasi berada di bawah satu otoritas utama, yakni GACC, yang memiliki wewenang langsung dalam mengawasi dan menetapkan aturan terkait perdagangan internasional. Kepabeanan Cina bersifat terpusat dan terpadu, mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan konsisten dalam menghadapi dinamika pasar global (Jayanti & Fattah, 2021).

### **Perbandingan Prosedur Administrasi Ekspor dan Impor**

Prosedur ekspor dan impor di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui penggunaan teknologi digital seperti INSW, tetapi pelaku usaha masih menghadapi kompleksitas tertentu akibat variasi dokumen dan keterbatasan harmonisasi regulasi antar instansi. Upaya perbaikan terus dilakukan agar prosedur menjadi lebih simpel dan waktu pelayanan semakin singkat.

Di sisi lain, prosedur administrasi di Cina cenderung lebih sistematis dan terstandarisasi melalui peraturan yang dikelola langsung oleh GACC. Hal ini mencakup regulasi kepabeanan, tarif, dan inspeksi barang yang secara rutin diperbarui untuk menyesuaikan dinamika global, serta memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi eksportir dan importir (Redjeki, 2023).

### **Perbandingan Kebijakan dan Implementasi**

#### **Kebijakan Administrasi Publik Ekspor-Impor Indonesia**

Kebijakan administratif Indonesia menitikberatkan pada reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur layanan publik melalui digitalisasi sistem. INSW menjadi contoh utama kebijakan yang berupaya mengefisienkan layanan publik, termasuk integrasi dokumen elektronik untuk kepabeanan dan izin ekspor-impor. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan SDM di berbagai wilayah.

#### **Kebijakan Administrasi Publik Ekspor-Impor Cina**

Cina terus memperbarui kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekspor serta mengelola kebutuhan impor yang dinamis. Kebijakan ini mencakup pengaturan tarif dan administrasi kepabeanan yang adaptif serta pengawasan ketat terhadap standar dan keamanan barang yang masuk dan keluar dari wilayah negara (Devitasari et al., 2023)

### **Evaluasi Implementasi Kebijakan**

Perbandingan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berupaya memperkuat sistem digital seperti INSW, masih terdapat tantangan terkait harmonisasi administratif dan kapasitas teknis pada tingkat lembaga. Sementara itu, Cina dengan sistem kepabeanan yang terpusat mampu

menerapkan kebijakan yang seragam dan responsif terhadap perubahan kondisi perdagangan global. Perbedaan ini menjadi indikator penting dalam memahami efektivitas administrasi publik masing-masing negara.

### **Peran Administrasi Publik dalam Mendukung Efisiensi Perdagangan Efisiensi Pelayanan Ekspor-Impor**

Pelayanan publik yang efisien menjadi faktor kunci dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor. Di Indonesia, penggunaan sistem layanan elektronik seperti INSW terbukti meningkatkan transparansi dan mempercepat proses dokumen, namun efektivitas penuh masih perlu didukung dengan pelatihan teknis SDM serta penyempurnaan integrasi data antar lembaga.

Sementara itu, Cina memiliki prosedur kepabeanan yang lebih terstruktur dan kemampuan respons cepat terhadap perubahan administrasi perdagangan. Struktur yang jelas ini mendukung daya saing ekspor China dalam pasar global yang kompetitif (Setiawan & Febriani, 2023).

### **Analisis Temuan dalam Perspektif Teori**

Dalam perspektif teori Good Governance, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi publik merupakan indikator penting dalam menyelenggarakan kebijakan ekspor- impor. Penerapan INSW di Indonesia mencerminkan upaya menuju pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga. Sebaliknya, administrasi publik Cina yang terpusat memberikan konsistensi implementasi kebijakan yang tinggi.

### **Implikasi Kebijakan dan Research Gap**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Cina memiliki perbedaan signifikan dalam struktur administrasinya, yang berdampak pada efektivitas pelayanan ekspor dan impor. Perbedaan tersebut memiliki implikasi pada strategi kebijakan yang diperlukan di masing-masing negara. Di Indonesia, diperlukan peningkatan integrasi sistem dan SDM, sedangkan Cina perlu menyeimbangkan struktur terpusat dengan kebutuhan inklusivitas pelayanan. Selain itu, masih terdapat gap penelitian terkait dampak administrasi publik terhadap pengalaman pelaku usaha dalam kedua negara secara empiris, yang menjadi peluang kajian lanjutan (Redjeki, 2023).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem administrasi publik dalam pengelolaan ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina dengan melihat struktur kelembagaan, mekanisme administrasi, serta implementasi kebijakan perdagangan di kedua negara. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kelancaran dan efisiensi kegiatan ekspor dan impor. Sistem administrasi yang tertata dengan baik mampu mendukung arus

perdagangan internasional, meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memperkuat daya saing negara di pasar global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Cina memiliki pendekatan administrasi publik yang berbeda dalam mengelola kegiatan ekspor dan impor. Indonesia cenderung menerapkan sistem administrasi yang melibatkan banyak lembaga dengan fokus pada integrasi layanan melalui digitalisasi, seperti penerapan Indonesia National Single Window (INSW). Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut masih menghadapi kendala berupa koordinasi antar lembaga dan ketimpangan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur di berbagai daerah.

Sebaliknya, Cina menerapkan sistem administrasi publik yang lebih terpusat dengan kewenangan yang kuat berada pada satu lembaga utama dalam pengelolaan kepabeanan dan perdagangan luar negeri. Struktur yang terpusat ini memungkinkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dilakukan secara lebih cepat dan konsisten. Hal tersebut berdampak pada efisiensi prosedur administrasi ekspor dan impor serta kemampuan Cina dalam merespons dinamika perdagangan global. Meskipun demikian, sistem yang sangat terpusat juga menuntut pengelolaan yang cermat agar tetap memperhatikan aspek transparansi dan kepentingan pelaku usaha.

Secara umum, perbandingan antara Indonesia dan Cina menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model administrasi publik yang sepenuhnya ideal untuk semua konteks. Setiap negara memiliki kelebihan dan keterbatasan yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, kondisi ekonomi, serta kapasitas institusional yang dimiliki. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Cina dalam hal penguatan koordinasi dan konsistensi kebijakan, sementara Cina dapat mempertimbangkan pendekatan pelayanan yang lebih inklusif dan adaptif sebagaimana diupayakan melalui digitalisasi layanan di Indonesia.

Penelitian ini juga mengungkap adanya keterbatasan, terutama karena data yang digunakan bersifat sekunder dan berfokus pada analisis kebijakan serta sistem administrasi secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris yang lebih mendalam, seperti pengalaman pelaku usaha dalam mengakses layanan ekspor dan impor, serta dampak langsung sistem administrasi publik terhadap efisiensi biaya dan waktu perdagangan. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas administrasi publik dalam mendukung perdagangan internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Devitasari, D., Khotimah, E., & Renviana, L. (2023). PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN

As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)

<https://ojssulthan.com/asje>

- INTERNATIONAL ( EKSPOR DAN IMPOR ) TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI. ... : Profetik Jurnal  
Ekonomi ..., 2(2).
- Jayanti, N. E., & Fattah, V. (2021). Analisis Perbandingan Volume Perdagangan Saham. 7(1), 1-11.
- Redjeki, F. (2023). Perdagangan Internasional Vaksin Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1), 507-512.
- Setiawan, R. A., & Febriani, L. (2023). Analisis dampak merger terhadap harga saham, abnormal return, dan volume perdagangan saham. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 179-185.
- Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ) Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ). Jurnal Ilmu Ekonomi ( Jie), 5(2), 247-261.